

PELAKSANAAN PENGAWASAN BAPAS KELAS 1
BANDUNG DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK
INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN

Oleh

Galih Dermawan

41151010160059

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum pada
program studi hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANG BUANA
BANDUNG
2020

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BAPAS CLASS 1
BANDUNG WITH ENTRY INTO THE REGULATION OF
THE MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
NUMBER 10 OF 2020 CONCERNING THE CONDITIONS
OF GRANTING ASSIMILATION AND RIGHTS
INTEGRATION FOR PRISONERS AND CHILDREN IN THE
CONTEXT OF PREVENTION AND CONTROL SPREAD
COVID-19 LINKED WITH LAW NUMBER 12 OF 1995
CONCERNING THE CORRECTIONAL

By

Galih Dermawan

41151010160059

Skripsi

To fulfill one of the exam requirements to obtain a law degree in the law study
program



FACULTY OF LAW,
LANGLANG BUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GALIH DERMAWAN
NPM : 41151010160059
Bentuk Penelitian : SKRIPSI
Judul :Pelaksanaan Pengawasan Bapas Kelas 1 Bandung Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Memberi Pernyataan

Galih Dermawan
41151010160059

ABSTRAK

Merebaknya wabah penyakit virus corona atau *Covid-19* membuat pemerintah mengambil langkah tegas untuk menekan laju penyebaran dengan mengeluarkan kebijakan membebaskan lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana karena diketahui Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia telah Overkapasitas. Hal ini diatur lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa lembaga yang di tunjuk untuk mengawasi dan membimbing narapidana dan anak yang mendapat asimilasi rumah adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS), Karena proses asimilasi dilakukan dirumah untuk mengikuti protokol kesehatan guna menekan penyebaran *Covid-19*. Hal ini juga menyebabkan pelaksanaan nya sedikit terhambat dan kurang efektif karena pemantauan dilakukan dari jarak jauh, sehingga permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu Kendala yang dihadapi Bapas Kelas 1 Bandung dalam melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap klien pemsarakatan di tengah penyebaran wabah penyakit *Covid-19* serta Faktor penegak hukum bagi *Residivis* yang mendapatkan asimilasi dan integrasi ditengah penyebaran wabah penyakit *Covid-19*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui pengumpulan data sebagai bahan menganalisis untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Bapas Kelas 1 Bandung Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor. 10 Tahun 2020. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat kekurangan karena terdapat ketidaksesuaian serta kendala yang mengakibatkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bapas menjadi terhambat. Contohnya mengenai ketidaksesuaian Sk asimilasi klien pemsarakatan sehingga mengakibatkan lost kontak, selain itu faktor penegakan hukum dinilai sangat penting terlebih lagi dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi itu kembali berulah dengan melakukan tindak pidana kejahatan yang sama hal tersebut mengakibatkan hak asimilasi nya dicabut, hukumannya pun akan diperberat di tambah sepertiga dari hukuman masa pidananya ketentuan ini diatur dalam Pasal 486 KUHP, 487 KUHP, dan 488 KUHP.

ABSTRACT

The outbreak of the corona virus ordisease has Covid-19 made the government take decisive steps to reduce the rate of spread by issuing a policy of releasing more than 30,000 (thirty thousand) prisoners because it is known that prisons and detention centers in Indonesia have overcapacity. This is regulated through Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Combating the Spread of Covid-19. The regulation explains that the institution appointed to supervise and guide prisoners and children who receive home assimilation is the Correctional Center (BAPAS), because the assimilation process is carried out at home to follow health protocols to reduce the spread of Covid-19. This also causes its implementation to be slightly hampered and less effective because monitoring is carried out remotely, so that the problems that will be investigated by the author are the obstacles faced by Class 1 Bandung Headquarters in carrying out supervision and guidance of correctional clients in the midst of the spread of the disease Covid-19. as well as law enforcement factors for recidivists who get assimilation and integration amid the spread of the disease outbreak Covid-19

This study uses a normative juridical approach, which is a study conducted by examining the articles in the laws and regulations relating to the issues raised in this study. The research specifications used are descriptive analytical, namely a method to describe or provide an overview of the object under study through data collection as an analysis material to solve problems related to the Implementation of Class 1 Bandung Bapas Supervision with the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number. 10 of 2020. Data analysis in this study uses qualitative juridical analysis, namely the data obtained is systematically compiled for further analysis in a sentence description, so that it does not use formulas or numbers.

The results of this study indicate that in the implementation of the policy there are still shortcomings because there are discrepancies and obstacles that cause the implementation of supervision by Bapas to be hampered. For example regarding the incompatibility of correctional client assimilation Skills resulting in lost contact, besides that the law enforcement factor is considered very important, especially with prisoners who get assimilation again acting up by committing the same criminal act, this results in their right of assimilation being revoked, the punishment will be revoked. heavier plus one third of the sentence of the criminal period this provision is regulated in Article 486 of the Criminal Code, 487 KUHP, and 488 KUHP.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah : “PELAKSANAAN PENGAWASAN BAPAS KELAS 1 BANDUNG DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang mana telah membantu membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini untuk itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi

Kemudian, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Wakil Rektor I, II, Universitas Langlangbuana Bandung.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN KRIMINAL, EFEKTIVITAS HUKUM DAN PENGARUH PIDANA TERHADAP RESIDIVIS, SISTEM PEMASYARAKATAN SERTA PEMBERIAN ASIMILASI, DAN BALAI PEMASYARAKATAN	
A. Kebijakan Kriminal.....	16
1. Pengertian Kebijakan Kriminal	16
2. Masalah Pembaharuan Hukum pidana.....	17

B. Efektifitas Hukum dan Pengaruh Pidana Terhadap Residivis	20
1. Pengertian Efektifitas Hukum.....	20
2. Pengaruh Pidana Terhadap Residivis.....	26
C. Sistem Pemasyarakatan.....	30
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	30
2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah Pembinaan Narapidana.	32
3. Pembinaan dan Bimbingan dalam Sistem Pemasyarakatan.....	34
D. Asimilasi	38
E. Balai Pemasyarakatan	44

**BAB III KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN
SISTEM PENGAWASAN DAN BIMBINGAN BAGI
NARAPIDANA DAN ANAK YANG MENDAPATKAN
ASIMILASI DITENGAH PENYEBARAN *COVID-19***

A. Sejarah Balai Pemasyarakatan	47
B. Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020	54
C. Contoh Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020	58

1. Ketidaksesuain Surat Keputusan (SK) Asimilasi dengan Data Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi di tengah Penyebaran *COVID-19*
2. Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi Kembali Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang sama di tengah Penyebaran *COVID-19*

BAB IV PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN ASIMILASI DENGAN KELUARNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

- A. Kendala Bapas kelas 1 Bandung Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan di Tengah Penyebaran Wabah Penyakit *Covid -19* 66
- B. Penegakan hukum bagi Residivis yang mendapatkan asimilasi dan integrasi ditengah penyebaran wabah penyakit *Covid-19*..... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 76

B. Saran.....	78
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

3. Ibu DR. Hernawati Ras, S.H., Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania ,S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno,S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum univeristas Langlangbuana
11. Para dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Para karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
13. Ibu Ani karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

14. Ucapan terima kasih untuk keluarga Tarung derajat Satlat Universitas Langlangbuana Bandung.
15. Ucapan terimakasih untuk keluarga LPM Momentum Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Ucapan terima kasih untuk semua sahabat sekaligus keluarga saya Alumni Saka Bhayangkara Buah Batu Bandung angkatan Pertama
17. Ucapan terima kasih untuk semua sahabat saya Nada Ayu Ananda, Sherly Syvia Rachman, Moh Ramdani, Dani Rizki Mulyana, Luthfi Fadhil Dirgahayu, Ade Yana Casmita, Rijal Yusanta serta rekan mahasiswa seangkatan 2016.
18. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan mempersembahkan tugas akhir ini kepada Ibunda tercinta Lilis Masitoh dan ayahanda Asep Sobur, kaka penulis Gugum Gumelar, S.Kom. dan Gina Lismala Deni, S.Kom. serta Adik Penulis Gandhi Wiguna atas semua motivasi dan saran yang selalu diberikan kepada penulis. Kesabaran dukungan baik moril maupun materil, untuk semua pengertian semangat dan kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhirnya, semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dapat menjadi pendorong untuk mencapai dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah

Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan banyak kebaikan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum Pidana. Amin.

Bandung, 15 September 2020

Penulis